



Nilai Usulan Capai Rp2,3 T

MEMPAWAH - Mementapkan rencana program pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Mempawah menggelar Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2023. Musrenbang yang diikuti puluhan pejabat daerah itu dibuka Wakil Bupati Mempawah, Muhammad Pagi, Kamis (24/3) di Aula Kantor Bupati Mempawah.

Musrenbang dihadiri Sekda Provinsi Kab. dr. Horison secara virtual, Sekda Pemkab Mempawah Drs. H. Ismail, Ketua DPRD H. Ria Mulyadi, Anggota DPRD Provinsi Kalbar d. P. P. Mempawah-Kuburaya, Anggota DPRD Mempawah, Forkompinda, Ketua KPU, Kepala OPD, Camat dan lainnya.

Membacakan sambutan tertulis Bupati Erlina, Muhammad Pagi menjelaskan pelaksanaan musrenbang untuk menyepakati permasalahan dan prioritas pembangunan daerah. Kemudian, menyepakati program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja.

Disamping itu, dia menilai perlunya penyesuaian program dan kegiatan pemban-

gunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi, serta klarifikasi program dan kegiatan yang merupakan kewenangan daerah kabupaten dengan program dan kegiatan desa yang diusulkan berdasarkan hasil musrenbang kecamatan.

"RKPD tahun 2023 merupakan penjabaran tahun ke-IV RPJMD Kabupaten Mempawah dan pelaksanaan dari misi ke-4 Bupati dan Wakil Bupati Mempawah. Dan pada tahun 2023 ini di fokuskan pada pembangunan desa melalui desa mandiri dengan beberapa sasaran pembangunan seperti meningkatkan kemandirian desa, mengurangi kemiskinan dan mengurangi ketimpangan pendapatan masyarakat," beber Muhammad Pagi.

Menurut Wabup, Musrenbang tahun anggaran 2023 memiliki makna yang penting. Karena merupakan penjabaran tahun ke-3 periode RPJMD Kabupaten Mempawah tahun 2020-2024. Tahun ini, sambung dia, merupakan tahun evaluasi pencapaian kerja Bupati dan Wakil Bupati Mempawah setelah dua tahun menjabat.

"Banyak program dan keg-



MUSRENBANG: Suasana pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Mempawah untuk tahun anggaran 2023.

iatan yang telah dilaksanakan untuk mencapai target kerja pembangunan di Kabupaten Mempawah," tegasnya.

Lebih jauh, Wabup mengatakan terdapat beberapa isu strategis dan keinginan masyarakat yang belum optimal. Diantaranya, peningkatan pelayanan kebutuhan dasar baik dibidang pendidikan, kesehatan, air bersih dan lainnya.

"Belum optimalnya implementasi penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik, serta IPM Kabupaten Mempawah masih berada dibawah rata-rata kabupaten dan kota di Kalbar. Saat ini,

IPM Mempawah menempati 10 besar," ungkapnya.

Wabup menyebut hasil musrenbang kecamatan dan forum OPD yang dilaksanakan pada Februari lalu meliputi 8 urusan dengan mengakomodir 198 program, 272 kegiatan dan 1.653 subkegiatan dengan nilai usulan Rp2,3 triliun lebih.

"Sementara estimasi anggaran belanja langsung tahun 2023 kurang lebih Rp1,086 triliun lebih. Maka kita perlu melakukan penajaman, penyesuaian dan klarifikasi rancangan RKPD sesuai prioritas pembangunan tahun 2023 yang nanti akan menjadi rujukan dalam penyusunan KUA

dan PPAS tahun anggaran 2023 dan RAPBD tahun 2023," harapnya.

Ditempat yang sama, Ketua Penyelenggara Musrenbang RKPD Kabupaten Mempawah, Didik Krismanto menerangkan tujuan dilaksanakannya musrenbang untuk mendapatkan masukan dalam rangka penyempurnaan rancangan awal RKPD yang memuat prioritas pembangunan daerah, pagu indikatif pendanaan berdasarkan fungsi SKPD, informasi mengenai kegiatan yang pendanaannya berasal dari APBD kabupaten APBD provinsi, APBN dan sumber lainnya. (wah)